

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kabupaten Ketapang Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi di bidang perikanan yaitu: perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perikanan, pemberian petunjuk teknis dibidang perikanan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perikanan, pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang perikanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan, penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Mengenai peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Terdapat beberapa permasalahan internal dalam pemberdayaan masyarakat nelayan diantaranya masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia perikanan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, masih perlu meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat perikanan dalam pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang bertanggung jawab, penurunan potensi Sumber Daya Ikan (SDI), terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan

pengelolaan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal, dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai jumlah aparatur yang melayani dan pembinaan dalam usaha perikanan belum optimal, sebagian nelayan masih dikategorikan masyarakat kurang sejahtera karena nelayan melakukan penangkapan ikan dengan alat tradisional, kerusakan lingkungan dan bencana alam dampak dari perubahan iklim, penggunaan bahan dan alat tangkap yang dilarang seperti meracuni dan memancing menggunakan pukat harimau, harga penjualan pasar yang tidak stabil, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan, serta tidak meratanya bantuan yang diberikan.

Melihat kondisi di atas Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sangat penting dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sungai Bakau dengan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nelayan di desa tersebut. Karena peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai pemegang otoritas untuk mengelola sumber daya alam ini dituntut untuk perencanaan yang matang serta sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan. Kekayaan sumber daya alam dari sektor perikanan ini telah menjadi primadona di Desa Sungai Bakau, seperti melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan produksi perikanan tangkap; melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kelembagaan nelayan kecil dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas); melaksanakan pembinaan

dan bimbingan teknis penggunaan alat tangkap; dan memberikan bimbingan dan penyuluhan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan.

Desa Sungai Bakau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Kondisi inilah yang membuat sebagian dari masyarakat Desa Sungai Bakau menggantungkan hidupnya dari hasil laut khususnya perikanan atau nelayan, baik dengan menjadi nelayan musiman maupun nelayan penuh. Terutama pada bulan Februari sampai April, dimana pada bulan-bulan ini melimpahnya persediaan ikan. Untuk mengetahui pendapatan nelayan selisish antara penerimaan dan total biaya nelayan per bulan pada tahun 2021 di Desa Sungai Bakau, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Besarnya penghasilan yang diterima oleh nelayan per bulan Setelah dikurangi biaya pengeluaran di Desa Sungai Bakau Kecamatan Tahun 2021

No	Uraian	Rp/Bulan
1	Penerimaan/Pendapatan	5.944.310
2	Biaya Pengeluaran	3.515.136
Jumlah		2.459.174

Sumber: Kantor Desa Sungai Bakau, Mei 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Bakau, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar 2.459.174 per/bulan setelah dikurangi biaya pengeluaran. Ukuran penghasilan diterima oleh nelayan dalam analisis pendapatan digunakan indikator penting karena merupakan

sumber utama mencukupi kebutuhan untuk sehari-hari. karena Desa Sungai Bakau merupakan daerah pantai berbatasan dengan laut yang kaya akan ikan, apabila ditangkap dapat dijual dan memberi penghasilan. Salah satu hambatan yang turut mempengaruhi aktivitas usaha nelayan tradisional adalah modal. Nelayan membutuhkan dana untuk memiliki perahu, mesin perahu, jaring dan biaya operasional penangkapan. Sementara itu, nelayan sulit memperoleh pembiayaan. masalah modal, maka para nelayan akan sulit berkembang secara mandiri.

Berdasarkan teori peran pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Syafiie (2013:142), bahwa peran pemerintah meliputi tiga aspek antara lain: Pemerintah sebagai regulator, dinimasilator dan fasilitator. Menyikapi pendapat Syafiie tersebut, menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dapat dilaksanakan melalui tiga aspek, yaitu pertama sebagai regulator, artinya pemerintah menawarkan referensi dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur semua kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Kedua, sebagai dinamisator yaitu pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat, biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan dan ketiga sebagai fasilitator, artinya pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat terkait.

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai regulator pada sektor perikanan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. dimana dinas memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya perikanan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam menjalankan salah satu fungsi yakni pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam hal ini, Dinas berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonominya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. dalam dimensi regulasi sudah dilaksanakan tetapi kurang optimal.

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai dinamisator merupakan penggerak partisipasi masyarakat nelayan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan sector perikanan). Sebagai dinamisator, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang belum melaksanakan perannya secara maksimal seperti pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat nelayan. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun dinas tertentu yang dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat nelayan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di Desa Sungai Bakau, itu

tidak lepas dari peran dinas setempat yang menjadikan masyarakat nelayan sebagai aktor utama dalam pemberdayaan guna untuk meningkatkan usaha dan penghasilan nelayan.

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai fasilitator adalah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sungai Bakau. Sebagai fasilitator, dinas berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman, dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan, namun pada kenyataannya belum terlaksana secara maksimal. Ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan secara kontanyu oleh dinas yang berkaitan dengan fungsi fasilitator yaitu: memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan. Pelatihan tersebut bagi nelayan dimaksudkan untuk memberikan berbagai pengetahuan seputar bagaimana pembudidayaan hasil perikanan. Kemudian penyuluhan dan pendampingan sebagai bentuk proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efiseiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai regulator belum

dapat mewujudkan sektor perikanan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

- b. Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai dinamisator belum dapat dilaksanakan secara maksimal seperti pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat nelayan.
- c. Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai fasilitator belum dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sungai Bakau seperti ketersediaan modal, sarana dan prasarana pendukung, yang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha masyarakat nelayan.

1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah atau terfokus, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada: Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator, dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha perikanan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan ruang lingkup masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana

peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha perikanan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ingin mendiskripsikan dan menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
- b. Ingin mendiskripsikan dan menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai dinamisor dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
- c. Ingin mendiskripsikan dan menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan dalam program studi Administrasi Publik kajian administrasi pembangunan.

2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi;
 - a. Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh rekomendasi, acuan, dan arahan terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan, dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha perikanan, sehingga akan dicarikan bentuk atau model pemberdayaan yang lebih praktis dan ideal di masa yang akan datang.
 - b. Bagi Masyarakat Desa Sungai Bakau, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat menambah wawasan dan referensi masyarakat nelayan agar dapat memberikan informasi yang konstruktif guna dijadikan bahan masukan bagi seluruh masyarakat yang terdapat di wilayah pesisir yang dominan bermata pencaharian sebagai nelayan pada umumnya dan kepada para masyarakat nelayan yang berada di Desa Sungai Bakau maupun Masyarakat Nelayan di Kabupaten Ketapang serta dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha perikananannya.